

BAB II

TRANSFORMASI SEKTOR MANUFAKTUR VIETNAM DAN KERANGKA INTEGRASI EKONOMI ASEAN

Bab ini berfokus pada dinamika perubahan sektor manufaktur Vietnam yang menciptakan keterikatan secara ekonomi antara Vietnam dan negara-negara ASEAN. Transformasi sektor ini tidak hanya mengubah struktur ekonomi domestik Vietnam, tetapi juga memberi dampak signifikan terhadap lanskap interaksi perdagangan di kawasan regional. Oleh karena itu, pembahasan pada bab ini disusun ke dalam beberapa bagian utama untuk menjelaskan gambaran umum ekonomi Vietnam, perkembangan sektor manufaktur Vietnam, dan konsep integrasi ekonomi ASEAN.

2.1 Gambaran Umum Ekonomi Vietnam

Sebelum terjadinya reformasi ekonomi dan kemajuan yang masif, Vietnam menggunakan model ekonomi terpusat yang ditandai dengan kepemilikan negara dan pengelolaan terpusat dari tingkat nasional hingga lokal. Model ini mempunyai ciri-ciri: 1) perekonomian dikendalikan negara melalui sistem perencanaan terpusat; 2) negara melakukan intervensi luas terhadap kegiatan produksi dan perdagangan; 3) sistem ekonomi lebih berorientasi terhadap pertukaran barang dan harga, upah, dan suku bunga tidak mengikuti mekanisme pasar; dan 4) birokrasi bersifat besar, kompleks, dan tidak efisien. Model ini menghilangkan persaingan pasar dan menghambat penerapan teknologi yang menyebabkan ekonomi menjadi tidak stabil, stagnan, dan krisis (N. M. Trang & Ninh, 2024). Selain itu, Perang Vietnam di Utara dan Selatan pada tahun 1975 memberikan

dampak ekonomi yang semakin memburuk. Buruknya kondisi ekonomi memaksa Partai Komunis Vietnam (PKV) untuk melakukan transformasi ekonomi. Pada tahun 1986, transformasi tersebut dilakukan yang dikenal dengan Reformasi Doi Moi (Asyathri, 2011; Porter, 1993).

Pada tahun 1986, Vietnam melakukan reformasi ekonomi yang disebut “*Doi Moi*”, merupakan langkah Vietnam untuk keluar dari jurang ekonomi akibat perang. Vietnam melakukan transformasi dari sistem ekonomi agraris terpusat menuju ekonomi pasar berorientasi sosialis yang menggabungkan intervensi negara dengan insentif dan aturan pasar bebas dengan mendukung badan usaha milik negara (BUMN), swasta, dan perusahaan asing (Anh et al., 2016; Pincus, 2015). Transisi tersebut melibatkan perubahan besar dalam kebijakan ekonomi nasional, termasuk: 1) mengembangkan ekonomi multi-sektor; 2) menghapus subsidi dan mekanisme perencanaan; 3) menghapus kontrol harga untuk barang konsumsi; 4) produksi industri difokuskan pada kebutuhan mendesak, yaitu pangan, barang konsumsi, dan barang ekspor; 5) sektor industri dan jasa yang berorientasi ekspor sebagai strategi untuk pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi asing (Diez, 2016).

Reformasi tersebut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi Vietnam. Pertama, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam meningkat dari 2.8% di tahun 1986 menjadi 7.09% di tahun 2024 (World Bank, 2025). Kedua, Vietnam meningkat dalam perdagangan, terutama sebagai eksportir. Sebagai contoh, Vietnam menjadi eksportir terbesar kedua didunia setelah Thailand dalam ekspor beras. Di tahun 1989, Vietnam mengekspor 1,4 juta

ton beras dan di tahun 2008, Vietnam mengekspor 4,7 juta ton (Tuan, 2009). Perdagangan Vietnam ke dunia pun tumbuh dengan rata-rata 115% dari tahun 1986 hingga 2024 (The Global Economy, 2024). Ketiga, kebijakan luar negeri Vietnam menjadi lebih fleksibel, pragmatis, dan realistis. Dengan pemikiran baru tersebut, tujuan keamanan dan pembangunan ekonomi nasional menjadi berkaitan, dengan berusaha menyediakan kondisi untuk Vietnam terbuka dengan investasi asing langsung (FDI) dan merancang kebijakan makroekonomi jangka panjang. Dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan memberikan fondasi bagi Vietnam memenuhi kebutuhan pertahanan nasionalnya (Tuan, 2009). Pembangunan ekonomi juga didorong dari keterbukaan dan usaha Vietnam untuk berintegrasi terhadap ekonomi global.

Keterbukaan terhadap ekonomi tersebut didukung oleh keikutsertaan Vietnam dalam berbagai organisasi regional dan global, yaitu Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 1995, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 1998, dan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2007. Keanggotaan Vietnam dalam jaringan perdagangan internasional dan regional membantu Vietnam dalam menyesuaikan kebijakannya dengan standar internasional dan regional (Tuan, 2009). Partisipasi tersebut juga membantu Vietnam untuk memperluas integrasi ekonominya ke tingkat global melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA) untuk mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif dan non-tarif. Hingga saat ini, Vietnam telah memiliki 18 perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang berlaku maupun yang masih direncanakan, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral (Dezan

Shira & Associates, 2025). Perjanjian-perjanjian perdagangan tersebut membantu Vietnam dalam memperluas dan memperkuat pasar dalam sistem perdagangan internasional dan meningkatkan reformasi kebijakan ekonomi yang lebih kompetitif.

2.2 Perkembangan Sektor Manufaktur Vietnam

Salah satu upaya Vietnam dalam menyokong kemajuan ekonominya adalah pengembangan industrialisasi. Kemajuan industrialisasi berawal dari reformasi Doi Moi yang mengubah struktur menuju pola yang lebih industrial dan berbasis jasa. Transformasi menandai awal berkembangnya sektor manufaktur sebagai bagian dari upaya Vietnam untuk beralih dari ekonomi agraris ke arah industrialisasi dan modernisasi (Goh, 2018). Pada periode awal Reformasi Doi Moi (1986-1995), pemerintah memperkuat proses tersebut melalui kebijakan liberalisasi perdagangan dan deregulasi ekonomi yang mendorong tumbuhnya industri manufaktur modern. Tahap ini juga menjadi momentum pemerintah dalam memprivatisasi perusahaan milik negara (SOEs) dan memperluas peran sektor swasta sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi nasional (Anja, 2020).

Pada tahun 2001, Vietnam mengembangkan “strategi industrialisasi dan modernisasi dengan orientasi sosialis untuk pengembangan fundamental industri baru tahun 2020”, dengan sektor prioritas yaitu pertanian, tekstil, alas kaki, elektronik, dan kulit. Selanjutnya, pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan promosi industrialisasi menjadi negara industri modern pada pertengahan abad ke-21. Isi utama program ini adalah restrukturisasi industri manufaktur berdasarkan sektor industri, wilayah, dan nilai produksinya (Vietnam Government

Portal, 2006). Namun, pemerintah kembali mengembangkan strategi tersebut dan mengeluarkan Strategi Pengembangan Industri Hingga 2025, dengan Visi hingga 2035 (*Industrial Development Strategy Through 2025, with a Vision to 2035*). Strategi ini menekankan pemanfaatan maksimal sumber daya domestik dan eksternal untuk mengembangkan serta restrukturisasi industri menuju arah yang lebih modern. Fokus utamanya adalah pelatihan tenaga kerja terampil dan inovatif, pengembangan serta alih teknologi di sektor berdaya saing tinggi seperti manufaktur, terutama di pertanian, kehutanan, dan perikanan, elektronik, telekomunikasi, tekstil dan alas kaki, energi terbarukan, teknik mesin, dan farmasi kimia. Strategi untuk mencapai target ekonomi pertumbuhan nilai industri sekitar 7% per tahun, ekspor industri diatas 90%, dan produk teknologi tinggi diatas 50% PDB setelah tahun 2025 (Vietnam Government Portal, 2014).

Selanjutnya, Rencana Pembangunan Sosial-Ekonomi untuk periode lima tahun dari 2021-2025 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan No. 99/NQ-CP. Rencana aksi tersebut menetapkan tujuan spesifik terkait sektor manufaktur, yaitu: 1) Laju pertumbuhan PDB rata-rata pada periode lima tahun ini mencapai sekitar 6,5-7%; porsi industri pengolahan dan manufaktur dalam PDB mencapai lebih dari 25%; ekonomi digital menyumbang sekitar 20% dari PDB; dan kontribusi produktivitas faktor total (TFP) terhadap pertumbuhan mencapai sekitar 45. Hingga tahun 2024 rencana tersebut terealisasi dengan menghasilkan pertumbuhan PDB dengan rata-rata 6.9%, porsi industri manufaktur dalam PDB rata-rata 24.33%, dan ekonomi digital menyumbang rata-rata 14.85% (Nhi, 2026; World Bank, 2025).

Strategi-strategi ini juga mencakup penataan ulang kawasan industri agar tercipta sinergi antarwilayah dan subsektor untuk memperdalam keterlibatan Vietnam dalam rantai nilai global. Industri prioritas meliputi: manufaktur dan pengolahan (khususnya mesin dan metalurgi), kimia, pengolahan hasil pertanian-kehutanan-perikanan, tekstil dan alas kaki, elektronik dan telekomunikasi, serta energi baru dan terbarukan. Tujuan utamanya adalah di tahun 2025, industri Vietnam memiliki struktur sektoral dan regional Asia Tenggara yang seimbang, berdaya saing tinggi, berbasis teknologi modern, serta mampu berpartisipasi aktif dalam rantai nilai global dengan tenaga kerja terampil yang mendukung produksi dan ekspor. Visi untuk tahun 2035, Vietnam menargetkan industri yang didominasi teknologi maju, berorientasi ekspor, menghasilkan produk berstandar internasional, hemat energi, dan mampu bersaing setara di pasar global, dengan tenaga kerja profesional, produktif, dan inovatif di bidang riset, desain, dan manufaktur (Hiep & Hoang, 2019). Perubahan-perubahan dalam kebijakan industri mengubah hasil positif bagi Vietnam.

2.2.1 *Foreign Direct Investment (FDI) di Sektor Manufaktur Vietnam*

Sebelum adanya investasi asing yang stabil, Vietnam mengalami 4 periode yang berbeda-beda dalam investasi asing di perjalanannya. Periode pertama (1990-1997), investasi asing berasal dari Asia, seperti Jepang, Korea, Singapura, dan Taiwan dan investasi difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), sektor manufaktur substitusi impor, dan investasi properti. Namun, menurut Encarnation dan Wells

(1986), kebijakan industrialisasi substitusi impor dikatakan memiliki dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Hal ini disebabkan industri substitusi impor merupakan industri tanpa daya saing internasional dan masih bergantung pada perlindungan pasar domestik. Di periode kedua (1998-2006), merupakan periode reformasi struktural yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan, restrukturisasi perusahaan milik negara, serta penyesuaian regulasi domestik untuk memenuhi standar WTO dan perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat. Meskipun arus FDI sempat melambat akibat krisis finansial Asia, Vietnam mulai memperbaiki situasi investasi melalui reformasi hukum, pengembangan industri pendukung, dan deregulasi ekonomi.

Periode ketiga (2007-2014) Vietnam resmi bergabung dengan WTO pada tahun 2007 yang mendorong peningkatan FDI berorientasi ekspor secara signifikan. Vietnam menjadi basis produksi manufaktur global, terutama melalui investasi perusahaan multinasional seperti Samsung. Selain itu, Vietnam mulai aktif dalam berbagai negosiasi perdagangan bebas seperti Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Uni Eropa untuk memperluas pasar ekspor dan menarik lebih banyak investasi asing.

Kemudian, periode keempat (2015-sekarang) menunjukkan lompatan besar industrialisasi Vietnam melalui implementasi berbagai mega-FTA seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta meningkatnya relokasi industri akibat

perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok sejak tahun 2018. Kondisi tersebut mendorong Vietnam menjadi salah satu tujuan utama diversifikasi rantai pasok global dan memperkuat posisinya sebagai pusat manufaktur dan ekspor di kawasan Asia Tenggara (Ikebe, 2023). Kini, investasi asing memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh Vietnam dan wilayahnya. Di bawah kebijakan perdagangan dan investasi yang liberal, hal ini akan membantu menggali potensi ekspor alami negara, dan investasi asing dapat memainkan peran kunci dalam menghubungkan industri manufaktur domestik dengan pasar global (Athukorala, 2009).

Dalam perjalanannya, Vietnam menjadi destinasi baru yang menarik bagi investor asing. Investasi asing memberikan keuntungan bagi industri manufaktur dalam melakukan produksi, transfer teknologi, ekspor, produktivitas tenaga kerja, dan membentuk hubungan antara perusahaan asing dan lokal. Vietnam telah mengalami tiga gelombang investasi asing langsung (FDI) paling banyak, dengan aliran masuk tahunan meningkat dari hampir nol menjadi sekitar USD 18 miliar, secara konsisten menyumbang sekitar 6% dari PDB. Sumber utama FDI dipimpin oleh Korea (18%), Singapura (16%), dan Jepang (16%) dari modal terdaftar yang terakumulasi dari tahun 1998 hingga 2024 (Banh & Hua, 2024). Vietnam diperkirakan akan tetap menjadi tujuan menarik bagi investasi asing langsung (FDI) setidaknya hingga tahun 2030, didorong oleh perannya dalam restrukturisasi rantai pasokan, perjanjian perdagangan, dan peralihan ke sektor manufaktur berteknologi tinggi. Meskipun

keunggulan tenaga kerja murah mungkin akan berkurang seiring berjalannya waktu, Vietnam secara aktif mengarahkan fokus FDI-nya ke sektor elektronik, semikonduktor, dan energi terbarukan guna mempertahankan daya saingnya dalam jangka panjang (Dezan Shira & Associates, 2026).

2.2.2 Sektor-Sektor Unggulan dari Manufaktur Vietnam

Pada tahun 2024, total omzet ekspor dan impor Vietnam mencapai 786.3 miliar USD, menandai tahun keempat berturut-turut omzet perdagangan mencapai angka lebih dari 100 miliar USD (Hanh, 2024; Ministry of Planning and Investment of Vietnam, 2024). Di balik angka agregat yang impresif tersebut, struktur perdagangan Vietnam didominasi oleh lima sektor unggulan yang secara kolektif menentukan posisi Vietnam dalam rantai nilai global. Dari sisi ekspor, terdapat lima sektor unggulan Vietnam yang memberikan kontribusi paling besar terhadap ekspor.

Pertama, tekstil dan garmen merupakan salah satu industri paling konsisten di ekspor Vietnam. Vietnam saat ini merupakan eksportir garmen terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Bangladesh, dengan nilai ekspor tekstil dan garmen yang secara konsisten berada di kisaran 40-45 miliar USD per tahun pada periode 2022-2024 (Hanh, 2026). Kedua, sektor elektronik dan teknologi telah menggantikan tekstil sebagai kontributor ekspor terbesar dalam satu dekade terakhir dengan menyumbang 40% dari total ekspor Vietnam. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti Samsung, Apple, LG, Intel, dan Foxconn (Trang &

Nguyen, 2026). Ketiga, sektor mesin dan peralatan industri bertumbuh pesat seiring ekspansi kawasan industri yang membutuhkan mesin produksi, meskipun sebagian besar masih merupakan re-ekspor dari komponen yang dirakit di Vietnam dan Vietnam sendiri masih membutuhkan impor untuk mesin berteknologi tinggi (Nguyen, 2022). Keempat, sektor alas kaki menempatkan Vietnam sebagai eksportir alas kaki terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, dengan nilai ekspor tahunan yang konsisten melampaui 20 miliar USD (Thu, 2024). Terakhir, industri kayu menjadi kategori ekspor utama, mewakili sekitar 61% dari total ekspor sektor tersebut dan mengalami kenaikan sekitar 6% dari tahun sebelumnya (Golan, 2026).

Dari sisi impor, lima sektor utama mencerminkan ketergantungan struktural Vietnam pada bahan baku dan komponen dari luar negeri. Elektronik menjadi komoditas impor terbesar, berupa komponen, *chip*, dan modul yang kemudian dirakit menjadi produk jadi untuk diekspor kembali. Pola ini menggambarkan posisi Vietnam dalam rantai nilai global sebagai negara perakitan (*assembly hub*) yang mengimpor konten teknologi tinggi dan mengekspor produk jadi. Mesin dan peralatan menjadi impor terbesar kedua, mencerminkan kebutuhan investasi terus-menerus dalam kapasitas produksi baru. Tekstil dan garmen juga menjadi komoditas impor karena Vietnam masih mengimpor benang, kain, dan bahan baku dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan untuk kemudian diolah menjadi produk garmen ekspor. Besi dan baja serta plastik melengkapi daftar impor utama,

mencerminkan kebutuhan industri manufaktur dan konstruksi yang terus berkembang (Hanh, 2024).

2.3 Konsep Integrasi Ekonomi ASEAN

Integrasi ekonomi regional merupakan perjanjian dan kerja sama ekonomi antara kelompok negara-negara di satu wilayah untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif terhadap aliran bebas perdagangan dan investasi (Cole et al., 1999). Balassa (1961) mengidentifikasi lima tahap integrasi ekonomi regional, yaitu *Free Trade Area*, *Customs Union*, *Common Market*, *Economic Union*, dan *Economic and Political Integration*. Setiap tahapan memiliki komitmen dan kedalaman integrasi yang berbeda, mulai dari eliminasi tarif sampai harmonisasi kebijakan ekonomi dan fiskal.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) didirikan pada tahun 1967 oleh lima negara pendiri (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina) melalui Deklarasi Bangkok, kini berkembang menjadi organisasi regional dengan 11 negara anggota yang mencakup Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste (per 2025). ASEAN memiliki visi menjadi perhimpunan satu kesatuan yang stabil, kompetitif, dan dinamis dengan kerja sama, mengatasi tantangan, dan berorientasi kepada rakyat. Berawal dari fokus pada kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi kemudian berkembang secara bertahap dan menjadi salah satu pilar utama. Prinsip dasar dari integrasi ekonomi ASEAN meliputi liberalisasi ekonomi, fasilitasi perdagangan, dan harmonisasi kebijakan antarnegara anggota. Salah satu contoh dalam liberalisasi ekonomi diwujudkan melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA).

ASEAN Free Trade Area (AFTA) dideklarasikan pada tahun 1992 melalui Common Effective Preferential Tariff (CEPT) *Scheme*, sebagai langkah awal menuju integrasi ekonomi dengan target mengurangi tarif perdagangan kawasan menjadi 0-5% untuk sebagian besar produk dalam waktu 15 tahun (ASEAN Secretariat, 2002).

Dalam mewujudkan integrasi ekonomi regional yang menyeluruh, ASEAN membangun mekanisme yang menjadi fondasi utama perdagangan, investasi, dan pasar, yaitu ASEAN Economic Community. ASEAN Economic Community (AEC) dibentuk pada tahun 2015, dengan fokus menjadi komunitas ekonomi yang terintegrasi dan kohesif. AEC Blueprint 2015, yang diadopsi pada tahun 2007, menjadi *roadmap* mencapai integrasi ekonomi dengan empat pilar utama: 1) *Single Market and Production Base*; 2) *Competitive Economic Region*; 3) *Equitable Economic Development*; 4) *Integration into the Global Economy*. Pilar pertama memiliki lima komponen utama: *free flow of goods, services, investment, capital, dan skilled labour*, seperti ASEAN Trade in Goods (ATIGA). Pilar kedua berorientasi kepada peningkatan daya saing kawasan melalui kebijakan, infrastruktur, perpajakan, dan lain-lain. Pilar ketiga adalah pembangunan ekonomi yang merata untuk mengurangi kesenjangan antarnegara. Terakhir, pilar keempat bertujuan membawa ASEAN terintegrasi ke global dengan berpartisipasi di berbagai perjanjian perdagangan (ASEAN Secretariat, 2008).

AEC mengembangkan kembali tujuan dari AEC Blueprint pada tahun 2015, dengan visi untuk periode 2016-2025. Konsep ini tercantum dalam AEC

Blueprint 2025, strategi ASEAN untuk berkomitmen melanjutkan proses integrasi menuju kawasan yang kompetitif, inklusif, inovatif, dan berorientasi berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, AEC Blueprint 2025 dibangun dari lima karakteristik, yaitu: 1) *A Highly Integrated and Cohesive Economy*; 2) *A Competitive, Innovative, and Dynamic ASEAN*; 3) *Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation*; 4) *A Resilient, Inclusive, People-Oriented, and People-Centred ASEAN*; 5) *A Global ASEAN*. Kelima karakteristik tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi negara-negara anggota dalam merumuskan kebijakan nasional yang selaras untuk mencapai tujuan integrasi kawasan.

2.3.1 Karakteristik AEC Blueprint 2025

Terdapat lima karakteristik AEC Blueprint 2025 yang menjadi pilar integrasi ekonomi ASEAN. Masing-masing karakteristik memiliki *strategic measures* untuk dicapai dalam periode 2016-2025.

- a. ***Highly Integrated and Cohesive Economy***, yaitu berfokus pada fasilitasi pergerakan yang lancar barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil untuk memperkuat jaringan pasar, perdagangan, dan produksi di ASEAN. Upaya tersebut mencakup peningkatan mobilitas tenaga kerja, integrasi sektor industri, serta penguatan fasilitasi perdagangan. Keberhasilannya diukur melalui penerapan liberalisasi perdagangan, volume perdagangan produk dan jasa intra-ASEAN, arus investasi, dan konektivitas di *regional production networks*.

- b. *Competitive, Innovative, and Dynamic ASEAN*** menyoroti pada elemen-elemen yang berkontribusi melalui penerapan kebijakan persaingan yang adil, mendorong penciptaan dan perlindungan pengetahuan, memperdalam partisipasi ASEAN dalam Rantai Nilai Global (GVCs), penguatan perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan digital, dan memperkuat kerangka regulasi terkait serta praktik regulasi secara keseluruhan.
- c. *Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation*** membahas peningkatan ekonomi dari berbagai sektor, seperti fisik, digital, dan institusional. Progres meliputi pembangunan infrastruktur transportasi regional (jalan, kereta api, pelabuhan), telekomunikasi, dan harmonisasi standar teknis yang mempermudah aliran barang, jasa, dan investasi di kawasan.
- d. *A Resilient, Inclusive, People-Oriented, and People-Centred ASEAN*** adalah kemampuan antarnegara memperkuat pertahanan ekonomi, memperkecil kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kapasitas UMKM dan bisnis lokal agar mampu bersaing dalam pasar regional. Contohnya, program Initiative for ASEAN Integration (IAI) membantu mengatasi kesenjangan pembangunan negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan perjanjian regional dan mempercepat proses integrasi kawasan.

e. *A Global ASEAN* sebagai tujuan dalam memperluas pengaruhnya ke dalam sistem ekonomi global melalui peningkatan posisi dalam rantai nilai global, efektivitas perjanjian perdagangan eksternal untuk memperluas cakupan perdagangan, investasi ke pasar yang lebih luas. Contohnya seperti, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan 15 negara: 10 anggota ASEAN dan lima mitra eksternal, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

AEC Blueprint 2025 mendukung kawasan yang terintegrasi, kompetitif, dan inklusif. Melalui lima karakteristik tersebut, AEC memfasilitasi pasar yang berhubungan untuk perdagangan dan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan individu, mempromosikan peluang bisnis, dan memperkecil kesenjangan pembangunan antara dan di dalam negara anggota ASEAN (The ASEAN Secretariat, 2015).

Di ekonomi global yang kompetitif, integrasi ekonomi ASEAN berfungsi sebagai strategi untuk menghadapi dominasi ekonomi besar seperti Tiongkok, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. ASEAN muncul sebagai blok ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2024, dengan total PDB sebesar US\$ 4,13 triliun (Yang et al., 2024). Selain memperkuat daya saing global, integrasi ekonomi ASEAN bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarnegara anggota. Melalui mekanisme seperti Initiative for ASEAN Integration (IAI), negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam) memperoleh dukungan teknis,

investasi, infrastruktur, sosial-politik, dan meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan perjanjian dan proses integrasi regional.

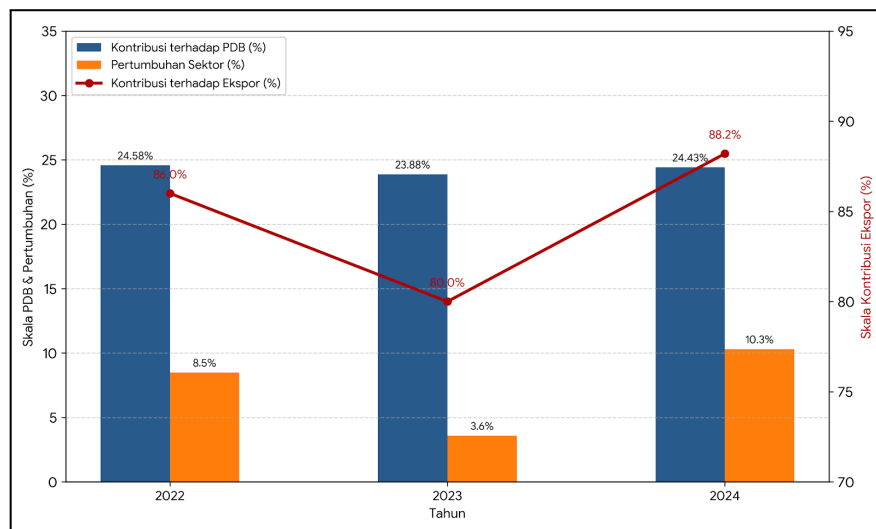
2.4 Perkembangan Sektor Manufaktur Vietnam Tahun 2022-2024

Tahun 2022-2024 menjadi periode dinamis dalam sejarah manufaktur Vietnam pasca reformasi *Doi Moi*. Periode ini menunjukkan perubahan-perubahan sektor manufaktur yang dipicu oleh berbagai kondisi eksternal dan internal negara. Perkembangan tersebut mendorong Vietnam menjadi salah satu basis produksi utama di kawasan Asia Tenggara. Selain meningkatkan kapasitas produksi nasional, perkembangan manufaktur Vietnam juga memperkuat posisi negara tersebut dalam rantai pasok global dan regional. Perubahan ini didorong oleh faktor dari kondisi eksternal dan internal.

Kondisi eksternalnya adalah relokasi rantai pasokan global dalam situasi perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang memberlakukan tarif perdagangan terhadap produk Tiongkok. Hal ini mendorong banyak perusahaan multinasional melakukan diversifikasi lokasi produksi melalui strategi *China+1* (China Plus One). Strategi tersebut dilakukan dengan memindahkan sebagian aktivitas manufaktur dari Tiongkok ke negara lain di Asia, termasuk Vietnam, untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu negara produksi. Pada tahun 2023, Vietnam menjadi pengespor ponsel terbesar kedua di dunia, setelah diversifikasi produksi perusahaan multinasional, seperti seperti Samsung, LG, Apple, dan Foxconn (Source of Asia, 2022).

Selanjutnya, perkembangan sektor manufaktur Vietnam didukung oleh kebijakan yang berorientasi pada liberalisasi ekonomi. Vietnam aktif mengikuti

berbagai perjanjian perdagangan bebas dan terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2020 dan 2021. Salah satu contohnya adalah perjanjian Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) memiliki peningkatan nilai perdagangan sebesar 14,3% dengan mencapai 104,5 miliar USD di tahun 2023 (Ministry of Industry and Trade of Vietnam, 2023). Selain itu, peningkatan arus *Foreign Direct Investment* (FDI) yang mencapai lebih dari 20 miliar USD selama periode 2023-2024 kian memperkuat sektor manufakturnya. Investor utama pada tahun 2024 adalah Singapura, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, dan Hongkong yang mencerminkan pergeseran rantai pasok global (Cyrill, 2024; Mallon, 2022). Biaya tenaga kerja yang relatif rendah dan stabilitas politik juga menjadi alasan dari berkembangnya sektor manufaktur Vietnam.



Gambar 3.1 Kontribusi Sektor Manufaktur terhadap Ekonomi Vietnam (2022-2024)

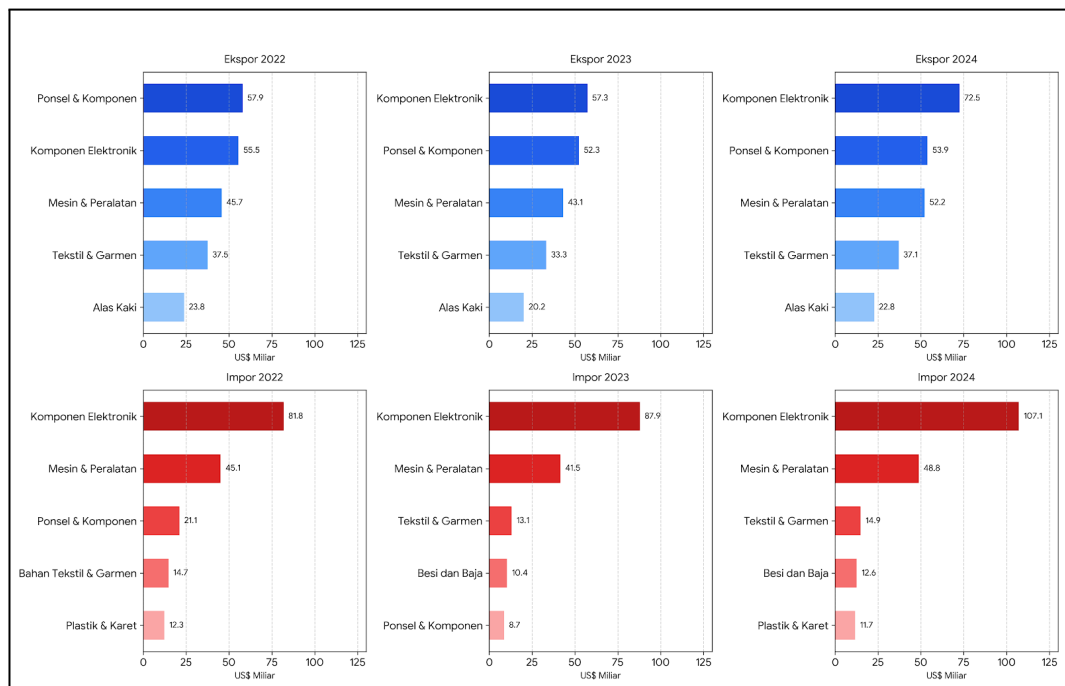
Sumber: Data diolah oleh penulis dari *General Statistics Office of Vietnam* dan *World Bank* (2025)

Gambar 3.1 menunjukkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB nasional yang meningkat dari 17% pada tahun 2010 menjadi sekitar 24.3% pada

tahun 2022-2024 terhadap total PDB Vietnam (General Statistics Office of Vietnam, 2023; World Bank, 2024). Kenaikan selama lebih dari satu dekade tersebut menempatkan Vietnam sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan manufaktur tercepat di Asia Tenggara, bahkan melampaui Thailand dan Malaysia dalam laju ekspansi output industri. Penguatan manufaktur ini tidak hanya mendorong pertumbuhan PDB secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional. Dari sisi perdagangan, sektor manufaktur menyumbang sekitar 84% dari total ekspor Vietnam pada periode 2022-2024, dengan nilai yang berfluktuasi dari 371.7 miliar USD pada 2022, turun menjadi 354 miliar USD pada 2023, lalu kembali meningkat mencapai 406 miliar USD pada 2024 (VietnamPlus, 2024).

Selanjutnya, pada Gambar 3.2, ekspor sektor manufaktur Vietnam kepada dunia selama periode 2022-2024 menunjukkan dominasi sektor elektronik dan teknologi. Produk seperti komponen elektronik, ponsel dan komponen, mesin dan peralatan, dan tekstil dan garmen secara konsisten menjadi komoditas ekspor utama Vietnam. Pada tahun 2024, ekspor komponen elektronik mencapai 72,5 juta USD dan menjadi komoditas manufaktur terbesar Vietnam, diikuti oleh ponsel dan komponen sebesar 53,9 juta USD serta mesin dan peralatan sebesar 52,2 juta USD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur manufaktur Vietnam semakin bergerak menuju industri berorientasi teknologi dan bernilai tambah lebih tinggi. Selain sektor elektronik, industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki juga tetap menjadi bagian penting dalam ekspor manufaktur Vietnam. Meskipun nilai ekspor tekstil dan garmen mengalami penurunan pada 2023,

sektor tersebut kembali mengalami peningkatan pada 2024 bersama dengan industri alas kaki. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam masih mempertahankan kombinasi antara industri manufaktur berbasis teknologi dan industri padat karya dalam struktur ekonominya.

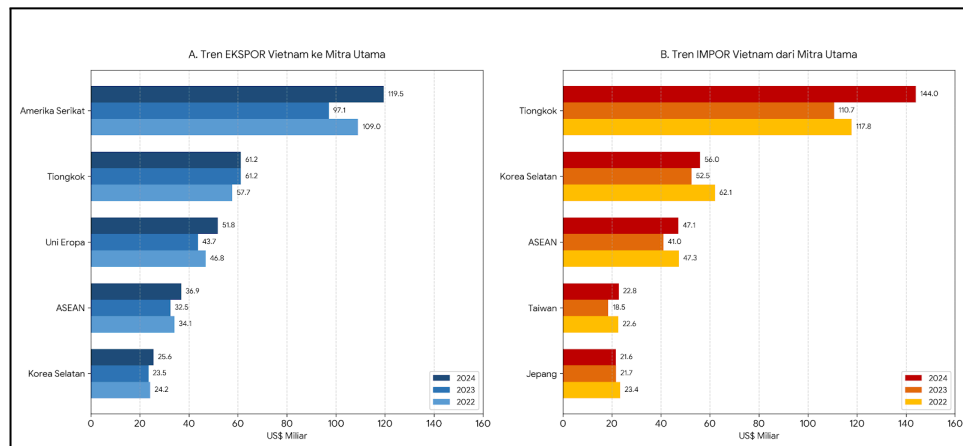


Gambar 3.2 Sektor Utama Ekspor-Impor Produk Manufaktur Vietnam (2022-2024)

Sumber: Data diolah oleh penulis dari *General Statistics Office of Vietnam* (2025)

Di sisi lain, data impor menunjukkan bahwa Vietnam masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor komponen elektronik dan mesin industri. Nilai impor komponen elektronik meningkat dari 81,8 miliar USD pada 2022 menjadi 107,1 miliar USD pada 2024. Mesin dan peralatan juga secara konsisten menjadi komoditas impor utama selama periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan industri manufaktur Vietnam masih sangat

bergantung pada pasokan bahan baku, komponen industri, dan teknologi dari luar negeri untuk mendukung aktivitas produksinya.



Gambar 3.3 Lima Mitra Utama Perdagangan Vietnam (2022-2024)

Sumber: Data diolah oleh penulis dari *General Statistics Office of Vietnam (2025)*

Selanjutnya, pada Gambar 3.3 ditunjukkan peringkat 5 teratas mitra negara-negara perdagangan Vietnam selama tahun 2022-2024. Data menunjukkan bahwa Vietnam memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara besar di luar ASEAN. Amerika Serikat secara konsisten menjadi pasar ekspor terbesar Vietnam, dengan nilai ekspor mencapai 109 miliar USD pada 2022 dan meningkat menjadi 119,5 miliar USD pada 2024. Sementara itu, Tiongkok tetap menjadi mitra impor terbesar Vietnam dengan nilai impor meningkat dari 117,8 miliar USD pada 2022 menjadi sekitar 144 miliar USD pada 2024. Situasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok mendorong relokasi rantai pasok global ke Asia Tenggara, dengan Amerika Serikat berperan sebagai pasar utama bagi produk manufaktur Vietnam, sedangkan Tiongkok menjadi pemasok utama bahan baku, komponen industri, dan *intermediate goods* yang dibutuhkan dalam proses produksi manufaktur Vietnam. Vietnam berkembang sebagai *alternative*

manufacturing hub dan penghubung dalam rantai pasok regional maupun global melalui strategi *China+1* yang dilakukan berbagai perusahaan multinasional (Source of Asia, 2022). Perkembangan sektor manufaktur Vietnam di tahun 2022-2024 menjadi menarik dianalisis karena periode ini menjadi periode dinamis manufaktur Vietnam. Pertumbuhan setelah pandemi COVID-19, strategi China Plus One, relokasi rantai pasok, dan *rebound* dari penurunan ekonomi global menjadi fase menarik untuk menganalisis tren dan pola yang terjadi di tingkat integrasi yang ada.

Gambaran perkembangan sektor manufaktur Vietnam dan kerangka AEC Blueprint 2025 yang telah diuraikan di atas menjadi landasan empiris dan analitis bagi pembahasan pada BAB III. Penelitian akan menjawab dari pertanyaan rumusan masalah yang berfokus pada pengaruh sektor manufaktur Vietnam terhadap dinamika *spillover* yang memperdalam integrasi ekonomi kawasan sebagaimana ditargetkan AEC Blueprint 2025 atau menghasilkan dinamika yang justru membatasi pendalaman integrasi tersebut.